

Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan

Amelya Putri Christanty ^{1*}, Randita Ainun Guntari ², Indah Prabawati ³, Wilda Sumarsyah ⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674048@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menurunkan tingkat kemiskinan agar kebijakan bantuan sosial dapat tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan biaya hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan pangan secara terarah dan berkelanjutan. Program ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi BPNT dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Ngoro. Selain itu, program ini juga relevan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-1 (No Poverty) yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dalam segala bentuk. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen, seperti laporan pelaksanaan program, peraturan terkait BPNT, dan statistik kemiskinan dari lembaga resmi terkait. Selain itu, studi ini dilengkapi dengan wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengeksplorasi pengalaman, dan persepsi mereka mengenai implementasi program BPNT.

Keywords: *Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Implementasi Kebijakan, Efektivitas, Kemiskinan, SDGs 1 (No Poverty)*

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan pembangunan yang kompleks dan multidimensional di Indonesia. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, tantangan struktural yang dihadapi masyarakat miskin masih belum sepenuhnya terselesaikan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki karakteristik multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan (Arifin & Wulandari, 2022).

Efektivitas program bantuan sosial sangat bergantung pada ketepatan data dan mekanisme distribusi yang digunakan oleh pemerintah (Nugroho et al., 2023). Studi lain juga menemukan bahwa kebijakan perlindungan sosial memiliki peran signifikan dalam menurunkan kerentanan masyarakat miskin, terutama ketika implementasinya didukung oleh koordinasi kelembagaan yang baik (Sari & Lestari, 2021). Di sisi lain, ketimpangan akses terhadap layanan publik masih menjadi faktor utama yang mempertahankan siklus kemiskinan di berbagai daerah (Prasetyo & Handayani, 2024). Dengan demikian, penanganan kemiskinan tidak hanya bersifat ekonomis,

tetapi juga membutuhkan penguatan aspek sosial dan tata kelola kebijakan publik yang efektif (Rahayu & Setiawan, 2023).

Dalam pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang diunggah oleh BPS, kemiskinan diukur berdasarkan ketidakmampuan individual atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan minimum. Tingginya proporsi pengeluaran pangan pada rumah tangga miskin menunjukkan bahwa aspek ketahanan pangan menjadi indikator krusial dalam melihat kondisi kesejahteraan. Artinya, meskipun angka kemiskinan menurun, tekanan ekonomi terhadap rumah tangga miskin masih besar, khususnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang layak dan bergizi (Todaro & Smith, 2020).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengimplementasikan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang kemudian bertransformasi menjadi Program Sembako. Program ini dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran pangan rumah tangga miskin melalui mekanisme bantuan elektronik yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Skema non-tunai diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran, mendorong transparansi, memperbaiki akuntabilitas, serta memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat miskin (Wahyuni & Nurhadi, 2022; Setiawan et al., 2023). Dengan demikian, program BPNT tidak hanya menjadi kebijakan nasional, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian SDGs tujuan pertama (No Poverty) melalui pengurangan beban ekonomi masyarakat miskin (Kurniawan & Pratama, 2024).

Secara normatif, desain kebijakan BPNT memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan akses terhadap bahan pangan bergizi dan menstabilkan konsumsi rumah tangga miskin. Di sisi lain, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan tertulis dalam dokumen perencanaan, melainkan sangat bergantung pada proses implementasinya. Berbagai laporan pengawasan dan evaluasi, termasuk yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia, menunjukkan masih adanya permasalahan dalam distribusi bantuan sosial, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pencairan, kualitas komoditas yang tidak seragam, serta lemahnya koordinasi antar pelaksana di tingkat daerah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BPNT benar-benar efektif dalam mendukung pengurangan kemiskinan (Ombudsman Republik Indonesia, 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial pangan memiliki peran dalam membantu rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai menunjukkan bahwa bantuan ini dapat membantu meningkatkan daya beli serta mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala administratif dan teknis di tingkat daerah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa program BPNT memiliki pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin serta dapat membantu meringankan beban ekonom masyarakat penerima manfaat, walaupun masih terdapat tantangan terkait ketepatan data penerima dan koordinasi antar lembaga pelaksana.

Di sisi lain, kajian empiris periode 2022-2025 menunjukkan bahwa program bantuan pangan memiliki kontribusi terhadap peningkatan daya beli dan stabilitas konsumsi rumah tangga miskin. Namun, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada pengukuran kuantitatif dampak program terhadap pengeluaran atau tingkat kemiskinan, sementara analisis mendalam mengenai dinamika implementasi di tingkat lapangan masih relatif terbatas. Padahal, dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh interaksi antara pelaksana kebijakan, struktur birokrasi, sumber daya, serta respons masyarakat sebagai

penerima manfaat (The SMERU Research Institute & Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2022).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan pendekatan kualitatif guna memahami secara lebih mendalam bagaimana implementasi BPNT berlangsung di lapangan dan bagaimana penerima manfaat memaknai dampaknya terhadap kondisi ekonomi mereka. Penelitian ini tidak hanya melihat capaian formal program, tetapi juga menggali realitas sosial yang terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai dalam upaya pengurangan kemiskinan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta memahami persepsi keluarga penerima manfaat terhadap kontribusi program dalam mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap tidak hanya keberhasilan, tetapi juga celah dan hambatan dalam implementasi kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap ini kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, organisasi, serta sumber daya saling berinteraksi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Azizah & Rajab, 2025).

Salah satu model implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Kusuma & Simanungkalit, 2022).

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas dan konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program (Yoswara et al., 2025). Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas implementasi program karena pelaksana tidak memiliki dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya (Kusuma & Simanungkalit, 2022).

Disposisi pelaksana mencerminkan sikap, komitmen, serta responsivitas aparat dalam menjalankan kebijakan, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat (Aprilia et al., 2023). Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi dan koordinasi antar lembaga yang mengatur pelaksanaan kebijakan sehingga program dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal sinkronisasi data dan alur kerja antar instansi (Listiana et al., 2025). Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi yang jelas dan tidak tumpang tindih antar aktor pelaksana (Yunika et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain program, tetapi juga pada kualitas faktor internal pelaksanaannya secara menyeluruh (Adriadi et al., 2025).

Dalam konteks perlindungan sosial di Indonesia, salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin adalah Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk bantuan non-tunai yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan melalui e-warong yang telah ditentukan. Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang lebih berkualitas (The SMERU Research Institute & Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial seperti BPNT dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin serta menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan penyaluran bantuan, serta koordinasi antar pelaksana program yang belum optimal (Suryahadi, 2019).

Dalam perspektif pembangunan global, program perlindungan sosial seperti BPNT dapat dipandang sebagai bagian dari strategi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama (No Poverty). Dalam kerangka ini, kebijakan bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen jangka pendek untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang dalam menekan tingkat kemiskinan, meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2025).

Kebaruan (novelty) dari penelitian berjudul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan” terletak pada fokus analisis yang tidak hanya menilai tingkat efektivitas program secara umum, tetapi juga mengkaji secara mendalam keterkaitan antara implementasi kebijakan BPNT dengan perubahan kondisi kemiskinan berdasarkan indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kualitas penyaluran bantuan, serta responsivitas penerima manfaat.

Penelitian ini juga memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menekankan evaluasi implementasi kebijakan di tingkat lokal, sehingga mampu mengungkap kesenjangan antara perencanaan program dan realisasi di lapangan. Selain itu, novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan publik dengan dampak sosial-ekonomi secara simultan, sehingga tidak hanya melihat BPNT sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai strategi intervensi struktural dalam pengentasan kemiskinan yang dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola dan distribusi bantuan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam upaya pengurangan kemiskinan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan program BPNT, interaksi antar pelaksana kebijakan dan penerima manfaat, serta dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program BPNT. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat penerima manfaat BPNT serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait pelaksanaan program BPNT. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat pemerintah atau pelaksana program BPNT, pendamping sosial, agen penyalur bantuan, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan penelitian. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pelaksanaan program, ketepatan sasaran penerima bantuan, kemudahan akses terhadap bantuan, manfaat program dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, serta berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi kebijakan. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan untuk melihat secara langsung kondisi penerima manfaat dan proses pelaksanaan program BPNT.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data sekunder meliputi dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait BPNT, laporan pelaksanaan program, data statistik kemiskinan, artikel ilmiah, jurnal penelitian terdahulu, serta publikasi dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih fleksibel dan mendalam. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi objektif di lapangan terkait pelaksanaan program BPNT. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, foto, dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah diperoleh sehingga dapat menjawab fokus penelitian mengenai efektivitas implementasi kebijakan program BPNT dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji tingkat validitas dan kredibilitasnya sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Ngoro pada dasarnya telah berjalan mengikuti ketentuan kebijakan yang

ditetapkan pemerintah, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah kendala teknis yang memengaruhi tingkat efektivitas program secara keseluruhan. Penyaluran bantuan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui sistem non-tunai yang memungkinkan penerima memperoleh bahan pangan di e-warong yang telah ditunjuk pemerintah. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses distribusi. Selain memudahkan pengawasan, sistem tersebut juga memberikan fleksibilitas bagi KPM dalam memilih kebutuhan pangan sesuai ketentuan program yang berlaku.

Keberadaan program ini terbukti memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari serta mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga miskin, khususnya pada situasi ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, BPNT juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini selaras dengan tujuan kebijakan perlindungan sosial yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (KEMENSOS, 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan BPNT tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sejalan dengan upaya global dalam menekankan angka kemiskinan sebagaimana tertuang dalam SDGs tujuan ke-1 yaitu pengurangan kemiskinan.

Dalam rangka menilai tingkat efektivitas implementasi BPNT, penelitian ini menggunakan beberapa indikator utama yang mencerminkan keberhasilan kebijakan, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, kualitas bantuan, serta kemudahan akses bagi penerima manfaat. Keempat indikator tersebut dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan tujuan program dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Melalui indikator-indikator tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan serta mengetahui berbagai hambatan yang muncul selama proses implementasi di lapangan. Pendekatan ini juga sejalan dengan kajian kebijakan sosial yang menekankan bahwa efektivitas program perlindungan sosial sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas distribusi, serta aksesibilitas bagi kelompok rentan (Wahyudi et al., 2024).

Tabel 1. *Indikator Efektivitas Implementasi Program BPNT di Kecamatan Ngoro*

Indikator	Kondisi di Lapangan	Keterangan
Ketepatan Sasaran	Masih terdapat penerima yang tidak sesuai kriteria	Belum Optimal
Ketepatan Waktu	Penyaluran bantuan terkadang mengalami keterlambatan	Kurang Optimal
Kualitas Bantuan	Kualitas bahan pangan tidak selalu sesuai standar	Kurang Optimal
Kemudahan Akses	Akses e-warong terbatas di beberapa wilayah	Belum Merata

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Ngoro masih dihadapkan pada berbagai kendala yang berdampak pada tingkat efektivitasnya. Permasalahan yang cukup menonjol terlihat pada aspek ketepatan sasaran dan kualitas bantuan, di mana masih dijumpai penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta kualitas bahan pangan yang diterima belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat.

Di samping itu, keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan juga menjadi kendala yang cukup signifikan karena dapat menghambat pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga secara tepat waktu. Keterbatasan akses terhadap e-warong di beberapa wilayah juga menunjukkan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya merata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

meskipun program telah berjalan, masih diperlukan upaya pembenahan dalam berbagai aspek implementasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

Tabel 2. Hasil Analisis Efektivitas Implementasi Program BPNT di Kecamatan Ngoro

Aspek Implementasi	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Efektivitas Program
Komunikasi	Sosialisasi program telah dilakukan, namun sebagian KPM masih belum memahami mekanisme penggunaan BPNT secara jelas	Menimbulkan kesalahan penafsiran dan pemanfaatan bantuan yang belum optimal
Sumber Daya	Tersedia e-warong dan sistem elektronik, tetapi jumlah e-warong terbatas dan sering terjadi gangguan teknis	Akses layanan belum merata dan proses transaksi terkadang terhambat
Disposisi Pelaksana	Pelaksana memiliki komitmen yang cukup baik, namun respons terhadap keluhan masyarakat masih lambat	Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal
Struktur Birokrasi	Koordinasi antar lembaga telah dilakukan, tetapi sinkronisasi data dan pengawasan masih lemah	Terjadi keterlambatan penyaluran dan ketidaktepatan sasaran bantuan
Dampak bagi KPM	BPNT membantu memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga	Program memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan
Evaluasi Umum	Implementasi BPNT tergolong cukup baik, namun belum optimal secara menyeluruh	Diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program lebih efektif

Berdasarkan hasil analisis efektivitas implementasi Program BPNT di Kecamatan Ngoro, diketahui bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan cukup baik namun belum optimal secara menyeluruh. Dari aspek komunikasi, sosialisasi program sudah dilakukan, tetapi masih terdapat KPM yang belum memahami mekanisme penggunaan BPNT secara tepat sehingga berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan bantuan. Pada aspek sumber daya, keberadaan e-warong dan sistem elektronik sudah mendukung pelaksanaan program, namun keterbatasan jumlah e-warong serta gangguan teknis masih menjadi hambatan dalam akses layanan.

Selanjutnya, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik, meskipun respons terhadap keluhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dari sisi struktur birokrasi, koordinasi antar lembaga telah berjalan, tetapi lemahnya sinkronisasi data dan pengawasan menyebabkan masih adanya keterlambatan serta ketidaktepatan sasaran bantuan. Meskipun demikian, program BPNT tetap memberikan dampak positif bagi KPM dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, sehingga berkontribusi terhadap upaya pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Pembahasan

Apabila ditinjau dari aspek komunikasi, penyampaian informasi terkait pelaksanaan BPNT kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi oleh aparat desa maupun pendamping sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sebagian KPM yang belum memahami secara jelas mekanisme penggunaan bantuan, termasuk prosedur transaksi dan ketentuan yang berlaku dalam program. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan sepenuhnya terserap secara merata oleh seluruh penerima manfaat, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran di kalangan penerima bantuan. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi, serta variasi pemahaman masyarakat turut memengaruhi efektivitas komunikasi kebijakan di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami sangat diperlukan agar tujuan kebijakan dapat diterima serta dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks implementasi BPNT, komunikasi yang kurang optimal dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman terkait mekanisme penggunaan bantuan, prosedur transaksi, maupun hak dan kewajiban penerima bantuan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program karena masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kebijakan yang dijalankan. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya intensitas sosialisasi juga turut memengaruhi keberhasilan komunikasi kebijakan di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahan penafsiran dalam implementasi kebijakan (Makmur, 2023). Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa kejelasan informasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program sosial pemerintah (Adiwinarni et al., 2023). Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program bantuan sosial (Sari et al., 2024). Penelitian selanjutnya turut menegaskan bahwa koordinasi komunikasi yang baik antara pelaksana program dan masyarakat dapat meminimalkan hambatan dalam implementasi kebijakan publik (Putri & Agustina, 2025).

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program BPNT didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana seperti e-warong serta sistem transaksi berbasis elektronik yang mempermudah proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya jumlah e-warong di wilayah tertentu yang menyebabkan akses masyarakat menjadi kurang merata, serta adanya gangguan teknis pada sistem yang dapat menghambat proses transaksi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi program. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi pelaksana di tingkat lokal dapat menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal dan berdampak pada efektivitas program secara keseluruhan (Kuriakose & Eknath, 2020).

Ditinjau dari aspek disposisi pelaksana, sebagian besar aparat yang terlibat dalam implementasi program BPNT telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memastikan bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan kurangnya responsivitas terhadap keluhan masyarakat serta lambatnya penanganan permasalahan yang muncul di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa disposisi pelaksana, khususnya dalam hal responsivitas, menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, di mana kurangnya responsivitas dapat menghambat efektivitas pelaksana program (Aprilia et al., 2023).

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan BPNT sebenarnya telah dilakukan, namun belum berjalan secara maksimal dan efektif. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan dalam pembaruan data penerima manfaat, kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta terbatasnya sistem pengawasan yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih

terdapat kelemahan dalam koordinasi dan integrasi antar lembaga, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selain itu, prosedur birokrasi yang cukup panjang juga dapat memperlambat proses implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, integrasi sistem, serta penyederhanaan struktur birokrasi agar program dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien (Listiana et al., 2025).

Dari sudut pandang penerima manfaat, program BPNT memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari serta mengurangi beban pengeluaran. Sebagian besar KPM menyatakan bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh penerima manfaat, seperti jumlah bantuan yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan serta kualitas bahan pangan yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program BPNT telah memberikan manfaat nyata, masih diperlukan berbagai perbaikan agar dampak yang dihasilkan dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi program BPNT dalam upaya pengurangan kemiskinan di Kecamatan Ngoro dapat dikatakan cukup baik, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat optimal. Program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan agar program BPNT dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, peningkatan efektivitas program BPNT menjadi penting tidak hanya dalam konteks kebijakan nasional, tetapi juga sebagai bagian instrumen kebijakan yang mendukung agenda pengentasan kemiskinan secara lebih luas, termasuk dalam kerangka SDGs tujuan pertama (No Poverty).

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam upaya pengurangan kemiskinan di Kecamatan Ngoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPNT tergolong cukup efektif dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Program ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan pertama, yaitu No Poverty. Namun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Efektivitas implementasi BPNT dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang belum berjalan optimal menyebabkan sebagian penerima manfaat belum memahami mekanisme program secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti jumlah e-warong dan gangguan sistem transaksi, turut memengaruhi kelancaran penyaluran bantuan. Dari sisi birokrasi, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal mengakibatkan keterlambatan pembaruan data dan distribusi bantuan. Meskipun demikian, program BPNT tetap memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat miskin.

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kualitas implementasi kebijakan sosial melalui peningkatan akurasi data penerima manfaat, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kualitas bantuan pangan, serta optimalisasi sosialisasi program kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu wilayah penelitian dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai dampak BPNT terhadap pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2023). Membaca aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam kebijakan publik: Studi implementasi program pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Administratio*, 11(1). <https://doi.org/10.23960/administratio.v11i1.105>
- Adriadi, A., Rusfiana, Y., & Pratama, D. P. E. (2025). Implementasi kebijakan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1649–1672. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/10337>
- Aprilia, D., Hernawan, D., & Apriliani, N. V. (2023). Pengaruh faktor disposisi dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dalam pengelolaan dana hibah koperasi. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1829–1837. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.10083>
- Arifin, Z., & Wulandari, S. (2022). Multidimensional poverty and its determinants in developing countries: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(2), 145–158. <https://doi.org/10.21002/jep.v23i2.1234>
- Azizah, F. K., & Rajab, R. (2025). Strategi implementasi kebijakan kearsipan digital pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2423>
- Kurniawan, D., & Pratama, R. (2024). Financial inclusion and social assistance: The impact of non-cash food assistance programs in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 19(1), 88–101. <https://doi.org/10.22146/jekp.112233>
- Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi insentif pajak menurut model G. Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Listiana, Y. D., Yumame, J., & Pugu, M. R. (2025). Public policy implementation: Challenges and solutions in achieving people's welfare. *Morfai Journal*, 5(1), 442–445. <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i1.2642>
- Makmur, S. (2023). Kesalahan penafsiran komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(3), 296–302. <https://lentera.publikasiku.id/index.php/ln/article/view/22>

- Nugroho, A., Kurniawan, B., & Hidayat, T. (2023). Targeting accuracy in social assistance programs and poverty reduction effectiveness. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 18(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jks.78901>
- Prasetyo, D., & Handayani, R. (2024). Inequality of access to public services and persistent poverty in rural Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 77–89. <https://doi.org/10.22146/jish.91234>
- Putri, R. R., & Agustina, I. F. (2025). Implementation patterns of BPNT in Kedungrawan Village Krembung. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(1). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i1.1436>
- Rahayu, S., & Setiawan, B. (2023). Governance and poverty alleviation: The role of public policy effectiveness. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 201–215. <https://doi.org/10.22146/jap.84567>
- Sari, M., & Lestari, N. (2021). Social protection policies and poverty vulnerability in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 99–112. <https://doi.org/10.22146/jsp.65432>
- Sari, S., Octaviani, V., & Mulyadi, M. (2024). Efektivitas komunikasi dalam penentuan penerima program BPNT di Desa Paku Haji Bengkulu Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(1), 321–330. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6283>
- Setiawan, A., Hidayat, T., & Lestari, P. (2023). Transparency and accountability in electronic-based social assistance distribution systems. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 145–158. <https://doi.org/10.22146/jap.99887>
- The SMERU Research Institute, & Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2022). Situasi dan Akses Lansia terhadap Program Perlindungan Sosial: Studi Kualitatif di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. www.tnp2k.go.id
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.) (13th ed.). Pearson Education.
- Wahyuni, S., & Nurhadi, M. (2022). Targeting accuracy in non-cash food assistance programs and poverty reduction effectiveness. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 14(3), 120–133. <https://doi.org/10.22146/jkse.77889>
- Yoswara, H., Afandi, M., Abdullah, S., Wirjatmi TL, E., & Nurliawati, N. (2025). Implementation of the Slum Rejuvenation Policy in the Cipelang River Area, Sukabumi City. 05(1), 57–71. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2024.2358326>